

**Pembiayaan *islamic Banking* (iB) Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri
Cabang Syariah Pekanbaru dan Relevansinya Dengan *Syirkah*
Menurut Imam Syafi'i**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)**



DI SUSUN OLEH :

M. NASRUL AMIN
NIM: 10725000127

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1432 H/2011 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dan Relevansinya Dengan *Syirkah* Menurut Imam Syafi’i”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui secara ilmiah bagaimana bentuk *musyarakah* yang ada pada pembiayaan tersebut yang kemudian penulis korelasikan dengan pemikiran Imam Syafi’i tentang *syirkah*. Sehingga penulis pada akhir penelitian ini akan dapat mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *musyarakah* pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, bagaimana konsep *syirkah* menurut Imam Syafi’i, dan bagaimana relevansi antara konsep *musyarakah* pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru terhadap konsep *syirkah* menurut Imam Syafi’i.

Penelitian ini bersifat penelitian study komperatif tentang konsep *syirkah* klasik menurut Imam Syafi’i (*Library Reaserch*) dan relevansinya dengan *musyarakah* yang di lapangan (*Field Reaserch*) yaitu pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

Data ini diambil dari dua sumber yaitu data primer dan skunder, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, *Library research*, yang kemudian dianalisa dengan tehnik deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, iduktif dan komperatif. Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan tentang konsep *musyarakah* pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, konsep *syirkah* menurut Imam Syafi’i dan relevansi konsep *musyarakah* pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru terhadap konsep *syirkah* menurut Imam Syafi’i.

Musyarakah pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru adalah pembiayaan kerjasama modal yang diberikan kepada nasabah dengan *flafon* kecil sama dengan Rp. 500.000.000,- dimana bank memberikan kuasa *wakalah* dalam pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah. Adapun keuntungan yang dihasilkan oleh bank diambil dari *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada awal kontrak akad *musyarakah* dengan nasabah sedangkan kerugian menjadi tanggungan nasabah jika hal itu disebabkan oleh kelalaian nasabah. Sedangkan *syirkah* menurut Imam Syafi’i adalah *syirkah Inan* yang hanya berhubungan dengan harta dan adanya pekerjaan. konsep *syirkah* klasik Imam Syafi’i nyatanya masih sangat relevan dengan *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil, dimana kemitraan yang ada pada pembiayaan iB Mikro Kecil adalah kemitraan yang didasarkan pada penyertaan modal sebagaimana *syirkah Inan* yang dikatakan oleh Imam Syafi’i. Serta telah memenuhi unsur *syirkah* yang dimaksud oleh Imam Syafi’i yaitu adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu dan membagi keuntungan dari hasil pekerjaan pada harta tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : SEJARAH BANK RIAU KEPRI SYARI'AH DAN

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Berdirinya Bank Riau Kepri Secara Umum	12
B. Sejarah Berdirinya Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah.....	13
C. Aktivitas PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru ..	16
D. Biografi Imam syafi'i.....	22
E. Pendidikannya	27
F. Guru-Guru Dan Murid-Muridnya	28
G. Karya-Karyanya	29

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *SYIRKAH* DAN

PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

H. Konsep <i>Syirkah</i>	32
I. Jenis-Jenis <i>Syirkah</i>	38
J. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	49

BAB IV : PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* iB MIKRO KECIL PT. BANK

RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU TERHADAP

KONSEP *SYIRKAH* MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Konsep <i>Musyarakah</i> Pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru	56
B. Konsep <i>Syirkah</i> Menurut Imam Syafi'i	63
C. Analisis Relevansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> iB Mikro Kecil Terhadap Konsep <i>Syirkah</i> Menurut Imam Syafi'i.....	70

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank menurut Undang-Undang RI Nomor. 10 Tanggal 10 November 1998 adalah : “ *Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”¹. Bank Syariah lahir sebagai upaya dari tujuan kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah². Di Indonesia hal ini didukung dengan adanya kebijakan yuridis *via* Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) sehingga memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syari’ah melalui *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syari’ah (UUS)³. Ini lah yang melatar belakangi PT. Bank Riau Kepri untuk membuka unit syariahnya yaitu PT. Bank Riau Kepri Syariah.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23

² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.18

³ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Cetakan Pertama, h. 16

PT. Bank Riau Kepri Syariah merupakan wujud dari pengembangan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang terus mengalami perkembangan dan kini telah memiliki 17 Kantor Cabang Konvensional yang menyertakan unit layanan syariahnya, 2 Kantor Cabang Syari'ah, 12 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Kas serta 2 Payment Point yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau⁴.

PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah menjalankan fungsi bank sebagaimana yang tertera dalam pengertian bank pada Undang-Undang RI Nomor.10 Tanggal 10 November 1998. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk menyalurkan dana kepada masyarakat PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah membaginya kedalam beberapa bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif, dan diantara pembiayaan produktif yang dikeluarkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah yaitu melalui produk pembiayaan *Islamic Banking* (iB) Mikro Kecilnya . “Pembiayaan iB Mikro Kecil merupakan suatu pembiayaan dimana pihak bank akan memberikan kerjasama dana kepada nasabah yang membutuhkan dana pada jumlah *flafon* kecil dari Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), pembiayaan ini termasuk juga ke dalamnya pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* ”⁵.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimanana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan

⁴ Dokument PT. Bank Riau Kepri Syariah

⁵Helwin Yunus (PINSI Pembiayaan), *Wawancara* , 14 Februari 2011.

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁶. Pola-pola *musyarakah* yang ada pada pembiayaan *musyarakah* saat sekarang ini tidak terlepas dari sumbangan pemikiran para *fuqoha* yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pemikirannya mengenai *syirkah*, salah satunya yaitu Imam Syafi'i.

Syirkah menurut Imam Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati⁷. Berdasarkan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i, tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan percampuran harta, bekerja pada harta itu, dan membagi untung dari hasilnya⁸. Dalam *syirkah* menurut Imam Syafi'i lebih memperhatikan bentuk kerjasamanya, kemudian cara memperolehnya serta pemanfaatannya bagi kedua belah pihak yang berserikat⁹. Hal ini merupakan konsekwensi logis dan memerlukan perhatian tersendiri, dimana dilihat dari realitas ekonomi yang berkembang selama ini telah dihadirkan berbagai macam kerja sama yang dilandaskan pada permodalan dalam usaha.

⁶ M.Nuryanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2010) h. 51

⁷ Asy-Syafi'I. *Al-Umm*, Terjemahan. H. Ismail Yakub, (Malaysia : Victory Agencie.1989), Juz V, h. 130

⁸ *Ibid*

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terjm Abdurrahman, (Semarang : Asy Syifa', 1990) , h. 264-272

Adapun dasar hukum *syirkah* yaitu firman Allah SWT :



Artinya : *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu*¹⁰. (QS : Shaad 24)

Dasar hukum *syirkah* di atas dapat dihubungkan dengan hadits Rasulullah SAW :

سليمان المصيصي , عن أبي حنيفة التيمي ,

عن أبيه, عن أبي هريرة رفعه قال : إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن

أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما [بينهما] ()

Artinya: *Dari Abu Hurairoh Ia menyandarkannya kepada nabi SAW, Ia mengatakan sesungguhnya Allah telah berfirman : “Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya (mitranya). Apabila Ia mengkhianatnya, maka Aku akan keluar dari keduanya”*¹¹.

Berangkat dari masalah di atas penulis ingin mengetahui secara jelas apakah konsep *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah memiliki prospek relevansi terhadap *syirkah* menurut Imam Syafi'i. Penulis memandang bahwa tulisan tentang konsepsi *musyarakah* dalam sistem tersebut belum ada yang membuatnya dalam bentuk suatu tulisan

¹⁰ Depag RI, *Op.cit.* h. 735-736

¹¹ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), Juz III, h. 226

karya ilmiah (skripsi), dan mengambil hal-hal yang relevan dengan konsep *syirkah* khususnya menurut Imam Syafi'i.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa dengan judul : **“Pembiayaan *islamic Banking* (iB) Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dan Relevansinya Dengan *Syirkah* Menurut Imam Syafi'i”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang *syirkah*, dan relevansi *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan *syirkah* menurut Imam Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang *Syirkah*?
3. Bagaimana relevansi pembiayaan *musyarakah* iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan *syirkah* menurut Imam Syafi'i?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar pembahasan yang penulis kaji ini mengarah serta dapat diketahui tujuannya, maka perlu adanya suatu tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi penulis untuk membahas masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui diskripsi *syirkah* menurut Imam Syafi'i.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan *syirkah* menurut Imam Syafi'i.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang konsep *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dan relevansinya terhadap *syirkah* menurut Imam Syafi'i, dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu .
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian study komperatif tentang konsep *syirkah* klasik menurut Imam Syafi'i (*Library Reaserch*) dan relevansinya dengan *musyarakah* yang di lapangan (*Field Reaserch*) yaitu pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yang berlokasi di jalan Sudirman Nomor. 628 Pekanbaru.

Adapun alasan penulis memilih PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yaitu karena menurut penulis pembiayaan yang ada pada produk pembiayaan *musyarakah* iB Mikro Kecil tersebut merupakan pembiayaan yang menggunakan pola-pola *syirkah* didalam implementasinya dan topik ini belum ada yang mengangkatnya dalam bentuk karya ilmiah.

2. Subyek Dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pemikiran Imam Syafi'i, Pimpinan, dan Karyawan/i PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru khususnya pada bagian Pembiayaan.. Sedangkan obyeknya adalah *musyarakah* pada produk pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru serta relevansinya terhadap konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i.

3. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan data :

1. Data primer, merupakan data-data yang diperoleh dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dan bahan primer dari literatur yang diambil dari kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i.
2. Data sekunder, merupakan data pendukung berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur lain yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu penulis melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan tentang pembiayaan iB Mikro Kecil pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.
2. *Library research*, mengumpulkan beberapa buku atau literatur yang relevan dengan materi pembahasan.
3. Wawancara, tanya jawab dengan pihak bank tentang materi atau permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh tentang pembiayaan iB Mikro Kecil pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru serta relevansinya terhadap *syirkah* menurut Imam Syafi'i untuk dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

6. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.
- c. Komperatif, yaitu penelitian komparasi yang dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan terhadap suatu masalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangan penyusunan penelitian akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis untuk pijakan pemecahan masalah dalam penelitian ini, terdiri dari pengertian *syirkah*, rukun *syirkah* dan syaratnya, jenis-jenis *syirkah* dan landasan hukum *syirkah*, pengertian pembiayaan *musyarakah*, manfaat pembiayaan *musyarakah*.

BAB III : LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menerangkan sejarah berdirinya PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta produk-produk PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. Biografi Imam Syafi'i, yang terdiri dari : Sejarah Kelahiran, Perjuangan Imam Syafi'i dan Karya-Karya Imam Syafi'i.

**BAB IV : PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* iB MIKRO KECIL PADA PT
BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU
TERHADAP KONSEP *SYIRKAH* MENURUT IMAM SYAFI'I**

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisa terhadap pembiayaan iB Mikro Kecil serta konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i, relevansinya antara pembiayaan *musyarakah* iB Mikro Kecil pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan *syirkah* menurut Imam Syafi'i.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis berkaitan dengan permasalahan yang ada.

BAB II

SEJARAH BANK RIAU KEPRI SYARIAH DAN BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Berdirinya Bank Riau Kepri Secara Umum

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Riau Nomor. 51/IV/1966 Tanggal 1 April 1966 yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan daerah Nomor. 14 Tahun 1992 jo. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan Perda Nomor. 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Notaris Mohammad Dahar Umar, SH. Nomor. 36 tentang pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan dengan Surat Keputusan Nomor. C-09851. HT. 01. Tahun. 2003 tanggal 5 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor. 5/30/KEP. DGS/2003 tanggal 12

Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau Kepri. Sampai saat ini PT. Bank Riau Kepri terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 17 Kantor Cabang Konvensional, 2 Kantor Cabang Syari'ah, 12 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Kas serta 2 Payment Poin yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau¹.

B. Pendirian Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah

Beroperasinya Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun juga didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplementasikannya Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani Transaksi Perbankan Syari'ah. Beberapa faktor lainnya adalah aspek *marketing* dimana Bank Syari'ah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam. Selanjutnya aspek syari'ah dimana masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak Bank Konvensional yang mengarah kepada *riba*. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syari'ah memiliki

¹Dokumen PT. Bank Riau Kepri.

berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Beberapa aspek di atas memungkinkan beroperasinya Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau atau yang belum².

Pendirian Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah diawali dengan melakukan restrukturisasi Organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau Nomor. 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan Sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau yang telah *online* serta terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syari'ah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha syari'ah Bank Riau dengan SK Direksi PT. Bank Riau Nomor. 39/KEPDIR/2003. Seiring dengan dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syari'ah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan syari'ah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik *Internal* maupun *External*, *marketing*, *research*, *training*, simulasi serta penyusun standar operasional dan prosedur. Kesiapan Sumber Daya Insani

² Dokumen PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah.

juga di belakangi secara intensif dengan *training*, *apprenticeship*, seminar perbankan syari'ah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapat tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI Nomor. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah termasuk penempatan Gedung untuk kantor Cabang Syari'ah dan UUS, Persiapan Aplikasi IT Syari'ah dan lain-lain. Pengurus izin Operasional dikirim ke Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah.

Pada tanggal 01 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan *Soft* dan *Grand Opening* Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah yang kala itu dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Drh. Chaidir MM. Bank Syari'ah Tanjung Pinang sebagai Cabang kedua mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006, diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM. Sani. Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah telah memiliki dua kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta satu kantor Kas di

kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta delapan Kedai Layanan Syari'ah (KLS)³.

C. Aktivitas PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru

Aktivitas PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan pembiayaan kepada pihak yang memerlukan dana.

Dalam penerimaan simpanan masyarakat bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan bentuk dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada debitur, pihak bank akan meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas kredit yang telah diberikan tersebut.

Pada saat ini PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru telah mempunyai beberapa jenis simpanan yang bergerak dibidang konvensional dan syari'ah diantaranya sebagaimana yang dijelaskan pada halaman berikut :

³*Ibid.*

Produk *Funding* (Penghimpun Dana)

1. Tabungan iB SINAR

Tabungan iB SINAR adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dalam arti dana tabungan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara professional dan memenuhi kaidah syari'ah. Keuntungan dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nasabah) yang disepakati dimuka.

2. Tabungan iB Dhuha (Haji Dan Umrah)

Adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), Haji plus dan umrah. Kini tabungan iB Dhuha hadir dalam 2 (dua) *skim* syariah.

3. Giro iB

Adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip *wadiah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

4. Deposito iB

Seposito iB Bank Riau adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yang penarikannya hanya

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank⁴.

Produk *Financing* (Penyaluran Dana)

1. Pembiayaan iB Aneka Guna

Pembiayaan iB Aneka Guna adalah, pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan iB Aneka Guna juga dapat diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh Nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya.

2. Pembiayaan iB Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaran bermotor *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, Pensiunan, Pekerja Profesi, dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan atau roda 4 (empat).

3. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah

Pembiayaan iB Pemilikan rumah bersedia membantu pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha untuk memiliki

⁴Brosur PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah..

tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun / kondominium, ruko, kios, rukan, apartemen, vila dan kavling siap bangun dengan prinsip *murabahah*

4. Pembiayaan iB Komersi

Pembiayaan ini merupakan bantuan modal kerja, kemitraan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana sebagai modal dalam melanjutkan dan menjalankan suatu usaha baik itu proyek dan sebagainya.

5. Pembiayaan iB Mikro Kecil

Disediakan untuk membantu pengusaha baik secara perorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi dengan prinsip *musyarakah*. Tujuannya untuk membantu pengusaha mendapatkan pembiayaan modal kerja atau kerja sama dana maupun pembiayaan investasi baik secara perorangan maupun secara kelompok.

6. Gadai Emas iB

Gadai Emas iB (*Rahn* Emas) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Riau Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai⁵.

⁵*Ibid*

Jasa Perbankan

1. Bank Garansi
2. Referensi Bank
3. Transfer, Kiriman Uang⁶

Visi Dan Misi**Visi**

Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan prinsip syariah

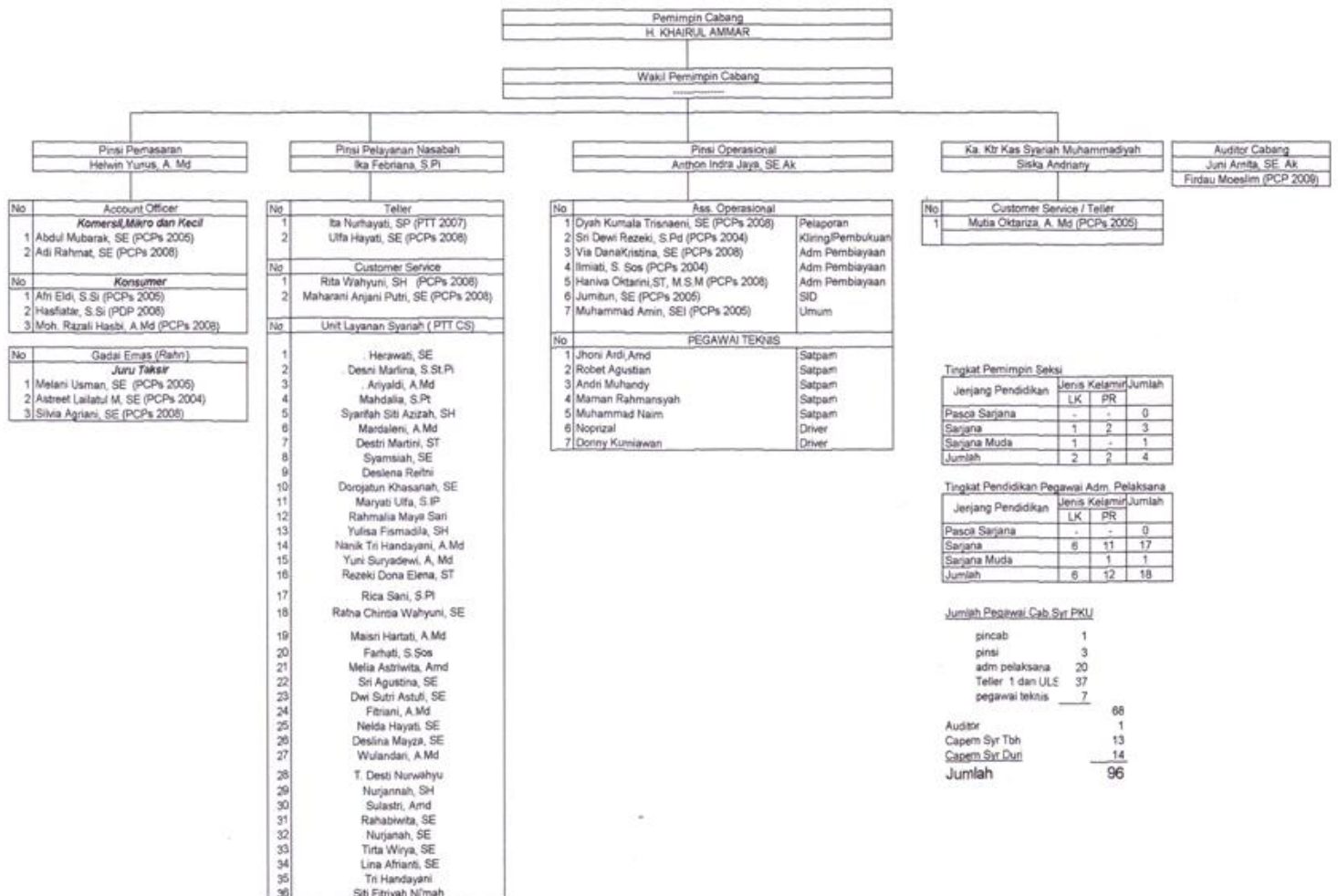
Misi

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal

⁶*Ibid.*

Struktur Organisasi Bank Riau Syariah

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU CABANG SYARIAH PEKANBARU



D. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris al-Abbas Ibn Ustman Ibn Syafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqaha dan pakar sejarah ulama fiqih. Namun, di tengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat juga pendapat lain, sebagian ulama menyatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza⁷.

Imam Syafi'i merupakan manusia dua zaman lahir pada zaman pemerintahan Umayyah dan meninggal pada zaman pemerintahan Dinasti Bani Abbas. Ketika Imam Syafi'i berumur 19 tahun, Muhammad al-Mahdi diganti oleh Musa al-mahdi (169-170 H/785-786 M). Ia hanya berkuasa satu tahun. Kemudian Ia digantikan oleh Harun al-Rasyid (170-194 H/786-809 M). pada awal kekuasaan Harun al-Rasyid, Imam Syafi'i berusia 20 tahun. Harun al-Rasyid digantikan oleh al-Amin (194-198 H/809-813 M), dan digantikan oleh al-Makmun (198-218H/813-833M)⁸.

⁷ Husain Abdul Hamid Abu Nasir, *Ringkasan al-Umm*, (Jakarta : Gema Insani , 2004), Cet. ke-2, h. 3.

⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, h27.

Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i hidup dengan status sebagai anak yatim yang miskin, namun beliau lahir dengan membawa nasab yang mulia. Saat itu nasabnya adalah sebaik-baik nasab bagi manusia, dan tetap menjadi nasab yang dihormati sampai zaman-zaman setelahnya. Kondisi beliau ini membuatnya merasakan apa yang dirasakan oleh kebanyakan masyarakat, beliau senantiasa berinteraksi dengan mereka sehingga Ia semakin mengenal tabiat buruk yang berkembang dikalangan masyarakat dan merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupannya, sering kali seorang wali kota negeri setempat memberikan hadiah. Namun beliau menolaknya karena merasa tidak berhak menerimanya. Sering juga kalifah pada saat itu memberikan hadiah kepadanya, namun disaat beliau keluar dari pintu istana, pemberian dari kalifah tersebut langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat yang membutuhkannya⁹.

Pada usia 10 tahun Imam Syafi'i dibawa ibunya ke Mekah, ketika Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H, Imam Syafi'i ingin memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan, ketika itu Gubernur Yaman datang ke Mekah, atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam Syafi'i diangkat oleh Gubernur menjadi pegawai di Yaman. Nasib baik beliau untuk memperbaiki taraf hidupnya tidak berjalan lama. Gubernur Yaman yang mengangkatnya menjadi pegawai menuduh Imam Syafi'i bersekongkol dengan *Ahl Bait* untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahannya. Pada tahun 184 H, kalifah Harun al-Rasyid memerintahkan supaya Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama 9 orang lainnya, atas bantuan seorang *qadhi* (hakim) di Baghdad yang bernama

⁹*Ibid*, h. 32-33.

Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani (teman dan pengikut Abu Hanifah) yang kelak menjadi guru beliau.

Seluruh kehidupan Imam Syafi'i berlangsung pada saat penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah Islam. Saat itu adalah saat dimana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya, kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India, dan Nabath, dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial¹⁰.

Di saat timbulnya orang-orang yang sedang dilanda kebigungan tersebut, munculah orang-orang Zindik yang menyiarkan pendapat-pendapat mereka yang merusak kaum Muslim. Dengan cara-cara yang sembunyi mereka berencana menghancurkan Islam. Para kalifah Bani Abbas memerangi orang-orang Zindik yang berusaha memberontak itu, mereka menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang membuat kerusakan, mensyaratkan paham kebebasan serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat dan yang melanggar larangan-larangan agama. Para kalifah juga memerangi orang-orang yang menyebarluaskan aqidah-aqidah sesat dengan menggunakan hujah-hujah palsu di tengah-tengah kaum Muslim. Para kalifah tersebut berusaha menghalau pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tersebut dengan mengerahkan para ulama untuk membantah faham-faham tersebut, mereka yang turut ambil bagian-bagian

¹⁰Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah aqidah, Politi dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2005), Ce t Ke-2, h. 85.

dalam memerangi aqidah-aqidah sesat tersebut adalah para ulama yang disebut di dalam sejarah pemikiran Islam dengan kelompok Mu'tazilah. Pada al-Manshur, al-Mahdi, al-Makmun, al-Mu'tasim, dan al-Watsiq membuka pintu istana pada kelompok Mu'tazilah. Sebagian diantara ulama Mu'tazilah pada masa kalifah tersebut ada yang menjadi mentri, pengawal dan sekretaris mereka. Bahkan kalifah al-Makmun menganggap dirinya merupakan bagian dari kelompok Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menjadikan filsafat sebagai salah satu perangkat yang dapat mempertahankan senjata mereka dan memperkuat hujah mereka. Namun mereka juga terbawa oleh cara musuh dalam menyerang dan mempertahankan diri, sehingga mengalirlah ke dalam kelompok Mu'tazilah berbagai masalah yang selalu dialami oleh musuh-musuh mereka. Setelah itu kaum Mu'tazilah mulai menimbulkan masalah-masalah filosofis yang tidak pernah dilakukan oleh ulama kaum Muslim dari kalangan nsahabat dan tabi'in. Aktivitas kelompok Mu'tazilah mengundang kecaman para fuqaha, karena metode yang mereka gunakan dalam berhujjah bertentangan dengan apa yang telah digunakan para ulama salaf dari kalangan fuqaha dan ulama hadist ketika mereka mengemukakan hujah permasalahan aqidah. Para ulama hadist dan fiqih mengenal agama mereka berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi¹¹. Saat ilmu kalam dengan bendera Mu'tazilah semakin berkibar di masa Imam Syafi'i, beliau malah sangat membenci ilmu kalam tersebut dan tidak mau sibuk mempelajarinya. Sebab beliau tidak melihatnya kecuali dalam sebuah bentuk gambaran yang dihadirkan dan disodorkan oleh Mu'tazilah. Oleh karena itu, dapat

¹¹*Ibid*, h. 87-88.

penulis katakan bahwa metode Mu'tazilah mempunyai pengaruh dalam diri Imam Syafi'i pada dua sisi; pengaruh negatif dan posisi positif yang lain. Di antara posisi positif adalah metode yang beliau tempuh dalam melakukan diskusi serta dialog seputar fiqih dan kuatnya hujah-hujah yang diajukannya¹².

Sebagai manusia, Imam Syafi'i memiliki keutamaan dan juga memiliki kekurangan. Di sejarah hidup, kebaikan Imam Syafi'i lebih banyak daripada ketidak baiknnya. Dalam konteks aliran hukum Islam, Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang toleran terhadap pendapat ulama lain. Salah satu pendapatnya yang menarik bagi kita karena dapat menjadikan sebagai *uswatun hasanah*, adalah pendapatnya yang menyatakan "*pendapaku benar, tetapi masih memungkinkan mengandung kesalahan, dan pendapat lain selain pendapatku adalah salah, tetapi masih memungkinkan mengandung kebenaran*". Suatu sikap yang menarik karena Imam Syafi'i bersikap selektif dan terbuka. Beliau tidak merasa paling benar dan tidak merasa benar sendiri. Atas dasar sikap tersebut, Imam Syafi'i sangat menghargai imam terdahulu dan yang sezaman dengannya. Sebagai manusia, Imam Syafi'i juga mendapat kritik bahkan penghinaan dari ulama lain. Para pengikut Abu hanifah menjelaskan riwayat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya pada generasi awal. Dalam rangka mengagungkan mahzabnya, mereka menjelek-jelekan Imam Syafi'i dengan berkata: "*Sesungguhnya Imam Syafi'i bukanlah keturunan bangsawan Quraisy, tetapi dia keturunan budak-budak Quraisy*". Begitu juga para pengikut Imam Malik, mereka menjelek-jelekan Imam Syafi'i dengan mengatakan: "*Imam Syafi'i adalah budak Imam Malik*". Karena fanatik

¹²*Ibid*, h. 90.

aliran hokum begitu tinggi, umat Islam yang hidup masa *taqlid* (jumud, statis) tidak segan-segan membuat hadist dan menghina Imam mahzab lain¹³.

E. Pendidikannya

Mengenai pendidikannya, sebagaimana tadi disebutkan Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza mayoritas pendapat. Pada usia 10 tahun beliau dibawa ibunya ke Mekah tanah air nenek moyangnya, beliau tumbuh dan besara dalam keadaan miskin dan yatim di Mekah. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai al-Ashma'i berkata: "*saya yang mentashih syair-syair Bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris*", Imam Syafi'i adalah Imam bahasa Arab¹⁴. Selama di Mekah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada Mufti di sana, Muslim bin Khalid az-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih usia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para ulama fiqh yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin al-Syafi', dan meminta ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru lainnya yang dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bkr al-Mulaiki, said bin Salim, Fuadhail bin al-Ayyadl dan

¹³*Ibid*, h. 45-47.

¹⁴Imam Syafi'i, [http, wikipedia. com](http://wikipedia.com) (27 April 2011)

masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk diberbagai halaqah ilmu para ulama fiqh sebagaimana tersebut di atas. Kemudian beliau belajar di Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Setelah itu ia pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana dan menimba ilmu di wilayah tersebut dengan berguru kepada seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan *tour* ilmiyahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin al-Hasan, seorang ahli fiqh di negeri Iraq. Beliau juga mengambil ilmu dari Isma'il bin Ula'iyah dan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menulis madzhab baru (madzhab jaded). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilmu diakhir bulan Rajab 204 H¹⁵. Dengan demikian Imam Syafi'i dalam menempuh pendidikannya bukan melalui pendidikan formal tetapi langsung menimba ilmu dari ulama ke ulama yang lainnya, karena kondisi pada masa itu¹⁶.

F. Guru-Guru dan Murid-Muridnya

Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadist pada guru yang tempat tinggal mereka saling berjauhan dan guru-guru tersebut juga mempunyai metode keilmuan yang berbeda. Ia memperoleh pelajaran dari guru-gurunya di Mekah, Madinah, yaman, dan guru-gurunya di Iraq. Jumlah mereka 19 orang, 5 orang di

¹⁵*Ibid*, h. 2-3.

¹⁶Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2000), h. 149.

Mekah, 6 orang di Madinah, 4 orang di Yaman, dan 4 orang di Iraq. Guru-guru beliau di Mekah adalah Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Athhar dan Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz bin Abu Rawad. Guru-gurunya di Madinah adalah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Abi Yahya al-Shaigh, sahabat Ibnu Abi Dzuaib. Guru-gurunya yang berasal dari Yaman adalah Muthraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf seorang qadhi kota Shan'a, Umar bin Abi Salamah sahabat al-Auza'I, dan Yahya yang berasal dari Iraq adalah Waki' bin al-Jarrah, Abu Usamah Hamad bin Usamah, keduanya orang Kufah, Ismail bin 'Alaih dan Abdul Wahab bin Abdul Majid keduanya orang Bashrah. Selain itu beliau juga berguru kepada Muhammad bin Hasan¹⁷.

Di samping guru, Imam Syafi'i juga mempunyai murid-murid yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fiqh Imam Syafi'i dan ada pula yang mendirikan aliran fiqh tersendiri. Di antara murid-murid beliau adalah al-Za'farani al-Kurabisyi, Abu Tsaur, Ibn Hanbal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi' al-Muradi di Mesir dan Abu 'Ubaid al-Qasim Ibn Salam al-Luqawi di Iraq¹⁸.

G. Karya-Karyanya

Di antara karya-karya Imam Syafi'i adalah:

1. *ar-Risalah*

Salah satu karangannya adalah "*ar-Rislah*" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "*al-Umm*" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru.

¹⁷Muhammad Ibrahim al-Fayyuni, *Imam Syafi'i Pelopor Fiqih dan Sastra*, (Jakarta: Erlangga, 2008), Cet Ke-1, h. 95.

¹⁸*Ibid*, h. 96.

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadist, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Iraq dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, "Beliau adalah orang yang paling faqih dalam al-Qur'an dan as-Sunnah", "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya leher al-Syafi'i". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus Sa'adah, "Ulama ahli fiqh, ushul, hadist, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Imam Syafi'i memiliki sifat amanah (dipercaya), 'adalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, darmawan, tingkah lakunya yang baik, dan deratnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutnya perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap"¹⁹.

2. *al-Hujjah*

Kitab "*al-Hujjah*" yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Iraq; Ahmad bin Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, Za'farani, al-Karabisyi dari Imam syafi'i.

3. *al-Umm*

Sementara kitab "*al-Umm*" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir, al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan dengan madzhabnya, "Jika sebuah hadist shahih bertentangan dengan pendapatku di belakang tembok". Bisa dikatakan bahwa kitab ini sebagai rujukan

¹⁹ Abu Zahroh, *Loc, Cit.*

Syafi'iah (pengikut Imam Syafi'i) sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa kitab ini merupakan *al-hujjah al-aula* dalam aliran Syafi'i. karena kitab inilah, Imam Syafi'i dianggap sebagai Bapak Ushul Fiqh²⁰.

²⁰Imam Syafi'i, [http. Wikipedia. Com](http://Wikipedia.Com), (27 April 2011)

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *SYIRKAH* DAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

A. Konsep *Syirkah*

Berbicara mengenai *syirkah* terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan pengertian, macam-macam, unsur *syirkah* syarat dan rukun-rukunnya yang mengharuskan sahnyanya hukum tersebut¹. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikannya dalam satu persatu mengenai yang berkaitan dengan konsep *syirkah* sebagai berikut :

1. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologi *Musyarokah* atau *syirkah* berasal dari bahasa Arab yaitu : - يَشْرِكُ - yang diartikan dengan : bersekutu, berserikat dengan Ia², dapat juga diartikan sebagai penggabungan atau pencampuran. Sedangkan secara terminologi *syirkah* mempunyai pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan macamnya, ini dikarenakan *syirkah* terbagi kedalam beberapa macam yaitu : *Syirkah Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah Amal*, dan *Syirkah Wujud*³.

¹Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M. A. Abdurahman, (Semarang: Asyifa, 1990), Cet. Kedua, h. 264.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung . 1990), Cet. Kedelapan. h. 196.

³M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*. (Jakarta : Rajawali Pers. 2007) Edisi I. h.143

Syirkah menurut mazhab Malik adalah suatu izin bagi kedua anggota serikat untuk melakukan pembelanjaan (*tasharruf*). Menurut mazhab Hambali *syirkah* merupakan persekutuan dalam pemilikan dan pembelanjaan. sedangkan menurut Hanafi *syirkah* adalah gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang terhadap modal dan keuntungan⁴.

Syirkah menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan diantara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan dibidang perdagangan, perindustrian atau pertanian⁵.

Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁶.

Berdasarkan pengertian yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan

⁴Wahbah az-Zuhaii, *Fiqhul Islam*, juz III ,(Beirut : Dar al-Fikr: t,th).

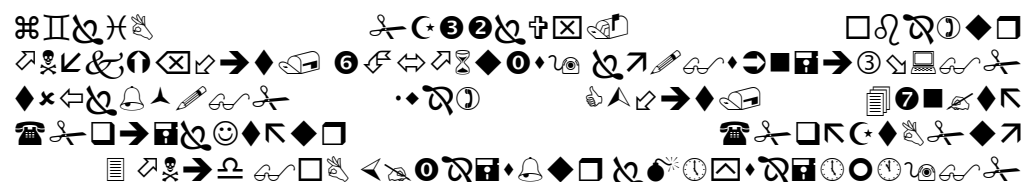
⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*. (Jakarta : Darul Haq. 2006) h. 472

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani. 2001) h. 90.

melakukan akad baik dalam mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan keuntungan dari harta tersebut.

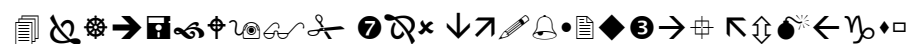
2. Landasan Hukum Syirkah

Adapun yang menjadi dasar hukum *syirkah* antara lain sebagaimana yang disyariatkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma', sesuai dengan firman Allah dalam surah Shaad ayat 24:



Artinya: *“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”* (Q.S Shaad: 24)⁷.

Firman Allah dalam surah *an-Nisa'* ayat 12:



Artinya : *“Maka mereka berserikat pada sepertiga”* (Q.S *an-Nisa'*: 12)⁸.

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan: 2006), h. 650.

⁸*Ibid.* h. 103.

Yang dimaksud dengan kata dalam surah *Shaad* diatas adalah “orang-orang yang melakukan kerja sama”⁹.

Dan hadist Nabi yang driwayatkan oleh Imam Abu Daud:

حدثنا محمد سليمان المصيصي ,
عن أبي حمزة الثيممي ,
عن أبيه , عن أبي هريرة رفعه قال : إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن
أحدهما صاحبه , فإذا خانه خرجت من بينهم [بينهما] .(

Artinya: Diceritakan Muhammad al-Masyisyi, diceritakann dari Muhammad bin az-Zubriqhani, dari abi Hayyan at-Taimiyyi dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Ia menyandarkanya kepada Nabi SAW, Ia mengatakan sesungguhnya Allah SWT berfirman : “Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak saing mengkhianati sahabatnya (mitranya), apabila Ia mengkhianatinya, maka Aku akan keluar dari keduanya. (HR. Abu Daud)¹⁰.

Hadist ini menjelaskan bahwa Allah SWT akan selalu bersama orang yang berserikat dengan memberi pertolongan dan limpahan rizki dalam perniagaan mereka, apabila diantara mereka telah melakukan khianat kepada sebagian yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah itu dari keduanya¹¹.

Mengutip dari tulisan Taqiyuddin an-Nabahi dalam dasar-dasar hukum *syirkah* mengatakan : “*Perseroan (syirkah) boleh dilakukan sesama muslim atau sesama kafir Dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan kafir Dzimmi.*

⁹Saleh al-Fauzan. *Loc Cit.*

¹⁰ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994) Juz III h. 226

¹¹ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut : Dar al-Fikr : T.th) Juz v, h. 390.

Sehingga orang Islam bisa melakukan perserikatan dengan orang Nasrani, Majusi dan kafir Dzimmi lainnya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan :*“Rasulullah telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang yahudi) dengan mendapatkan bagian dari hasil panen buah dan tanaman”*.

Imam Thurmudzi meriwayatkan hadist dengan sanad dari Aisyah ra, yang artinya : *“Rasullullah telah mengutus kepada seorang yahudi untuk meminta dua baju (untuk diserahkan kepada Maisyaroh).*

Dengan demikian hukum melakukan perseroan dengan orang Yahudi, Nasrani dan kafir Dzimmi adalah mubah. Hanya saja, orang non-Muslim tersebut tidak boleh menjual minuman keras atau barang yang diharamkan lainnya sementara mereka melakukan perseroan dengan orang muslim. Sedangkan barang haram yang diperdagangkan sebelum mereka melakukan perserikatan dengan orang Islam, laba penjualannya yang dipergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam tetap boleh dipergunakan¹².

Demikianlah beberapa dasar hukum dibolehkannya untuk melakukan *syirkah* yang berdasarkan al-Qur'an , Hadist dan Ijma', sehingga jelas bagi kita bahwa *syirkah* tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja, namun juga dibolehkannya untuk melakukan perserikatan dengan orang non-Muslim sepanjang hal itu tidak bertentangan dan melanggar norma-norma syariat Islam.

¹²Taqiyuddun an-Nabahi, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996) Cet Ke-2 h. 155

3. Syarat dan Rukun *Syirkah*

Adapun yang menjadi syarat dalam *syirkah* ada lima syarat sebagai berikut:

- a. Benda (harta) dinilai dengan uang (Dinar, Dirham, dalam Rupiah dan lain-lain).
- b. Harta-harta itu sesuai dengan jenis dan macamnya.
- c. Harta-harta itu dicampur.
- d. Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta-harta itu.
- e. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing¹³.

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) mengatakan bahwa dalam *syirkah* tidak disyaratkan percampuran modal, karena *syirkah* itu dianggap sah melalui akadnya bukan melalui hartanya.

Adapun rukun *syirkah* yang pokok ada tiga yaitu¹⁴ :

- a. *Akad*

Adapun yang menyertai dalam akad ada dua hal yaitu : Ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan. Dan Kabul, yaitu pernyataan menerima ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Kedua hal ini disebut juga dengan *sighat*¹⁵. Dalam perakteknya, di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu

¹³ Taqiyuddin Abi Bakar ibnu Muhammad, *Kifayaul Akhyar*, (Beirut : Dar al-Fikr , t.th) Jilid I, h. 280.

¹⁴ M. Sholahuddin, *Loc. Cit.*

¹⁵ *ibid*

dicantumkan dalam Akte pendirian serikat itu, yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisakan perjanjian untuk mengadakan serikat. Akad dapat dikatakan juga sebagai perikat perjanjian, dan pemufakatan.

b. *Aqidaini* (pihak-pihak yang mengadakan perserikatan)

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat itu haruslah orang yang berakal, *baligh*, dan dengan kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan.

c. *Ma'qud alaih* (Pokok pekerjaan)

Dalam pokok pekerjaan ini tercakup kedalamnya , objek akad, yaitu *mal* (modal), pekerjaan (*dharobah/amal*) dan *ribh* (keuntungan)¹⁶.

B. Jenis-Jenis *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* dapat dibagi kepada dua bentuk yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*. yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. *Syirkah Amlak* (kepemilikan)

syirkah Amlak (kepemilikan) adalah beberapa orang yang memiliki secara bersama-sama suatu barang, kepemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada aqad/ perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan oleh pewarisan¹⁷. Bentuk *syirkah*

¹⁶*Ibid*

¹⁷Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika . 2004) , Cet Ke-3 h. 79

Amlak ini terbagi menjadi *syirkah amlak Ikhtiyari* dan *syirkah amlak* yang bersifat *Jabari* atau *Ijbari*.

a. *Syirkah Amlak Ikhtiyari*

Syirkah Amlak yang bersifat *Ikhtiyari* adalah bahwa dua orang atau lebih disertai tanah wakaf atau barang, *hibah*, *hibah* lain kemudian ia menerimanya maka barang yang dihibahkan atau diwakafkan itu menjadi milik mereka berdua. Demikian pula apabila mereka membeli barang secara bersama, maka barang yang mereka beli tersebut disebut sebagai *syirkah ikhtiyari*.

b. *Syirkah Amlak Jabari*

Adalah perserikatan yang muncul secara memaksa dan bukan kehendak dari orang yang berserikat, misalnya dua orang atau lebih menerima harta warisan. Bagi mereka mau tidak mau harus menerima harta warisan tersebut. Status harta dalam dua bentuk *syirkah amlak* ini sesuai dengan hak-hak orang yang berserikat. Masing-masing hanya dapat bertindak hukum terhadap harta *syirkah* itu apabila ada izin dari pihak lain karena orang lain tidak mempunyai hak atau kekuasaan atas harta seseorang yang menjadi mitra serikatnya¹⁸.

Jadi dapat dimaksudkan bahwa *syirkah Amlak* adalah suatu pernyataan antara dua orang atau lebih terhadap satu barang dengan tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki.

¹⁸ *Op. Cit*, h. 793

2. *Syirkah Uqud* (Kemitraan Berdasarkan Kontrak)

Syirkah Uqud merupakan bentuk paling utama dalam *syirkah* hal ini disebabkan karena perserikatan terbentuk oleh adanya kesengajaan para pihak dalam melakukan perjanjian untuk bekerja sama/bergabung dalam satu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda)¹⁹. *Syirkah* ini terbagi kepada beberapa bentuk yaitu :

a. *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama²⁰.

Menurut mazhab Maliki *syirkah Inan* dapat diartikan dengan bersyirkatnya dua orang atau lebih dengan ketentuan tidak ada yang mengelola harta syarikat kecuali dengan kehadiran dan kesertaan mitra atau dengan seizinnya²¹.

¹⁹ *Ibid*

²⁰Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), Edisi I. h. 121.

²¹Muhammmad, *Konstruksi Mudhorobah dalam Bisnis Syaria'h*, (Yogyakarta : BPFE, 2005), Cet Pertama, h. 34-35.

Dalam *syirkah Inan* tidak menyaratkan persamaan dalam harta, tindakan, ataupun dalam keuntungan. Harta salah seorang dari keduanya boleh lebih banyak daripada harta yang lain²². Masing-masing dari mereka berhak mengelola *syirkah*, baik atas nama dirinya atau menjadi wakil dari mitranya yang berhubungan dengan segala tindakan yang terdapat didalam kemaslahatan perserikatan²³. Hal ini dimaksudkan bahwa perserikatan ini dibangun dengan prinsip *Wakalah* (bisa diwakilkan) dan *Amanah* (kepercayaan).

Syarat-syarat keabsahan *syirkah* ini diantaranya adalah :

- a. Modal dan bagian dari masing-masing anggota serikat hendaklah diketahui, karena keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang erat kaitannya dengan kondisi modal dan saham yang ada. Ketidaktahuan akan modal dan saham akan menyebabkan memakan harta orang lain dengan jalan *bathil* dan ini diharamkan dalam Islam.
- b. Keuntungan yang didapatkan dibagikan sesuai dengan saham yang ditanam masing-masing anggota serikat, sehingga tidak boleh dikatakan : "keuntungan yang kita dapatkan dari kambing diperuntukkan bagi si A, sedangkan keuntungan yang kita dapatkan dari pohon rami diperuntukkan bagi si B",

²²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta : PT. Pena Pundi Akasara, 2009), Cet Pertama, h. 327.

²³Abu Bakar Jabir al-Jazai'ri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Haq, 2006), h. 473.

karena didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan yang diharamkan.

- c. Modal yang ditanam harus berbentuk uang, dan orang yang memiliki sesuatu barang dan bermaksud menjadi anggota sebuah serikat, hendaklah Ia menaksir barangnya dengan uang menurut harga yang berlaku hari itu dan memasukkannya kedalam modal serikat. Karena kalau berbentuk barang, maka ia tidak jelas nilainya, sedangkan *muamalah* yang tidak jelas dilarang oleh syariat²⁴.

Apabila perserikatan telah terbentuk dengan baik, maka serikat tersebut bisa melakukan kerja. Setiap anggota boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya membawa kemaslahatan bagi mitra lainnya. Selajutnya dijelaskan bahwa keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan penyertaan modal masing-masing dan begitu juga sebaliknya jika terjadi kerugian, maka disesuaikan dengan modal yang disertakan dalam perserikatan tersebut.

Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib :

الربح على ما شرط والوضيعة على قدر الما لين

²⁴*Ibid*

Artinya: “*keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka, dan kerugian didasarkan atas kadar modal (pihak-pihak yang bersekat)*”²⁵.

Adapun bentuk *syirkah* seperti ini telah mendapat kesepakatan dari semua *fuqoha*, dan merupakan bentuk yang paling penting dan sepertinya mendekati konsep modern kemitraan bisnis saat ini²⁶.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Mufawadhah secara bahasa adalah kesamaan dan secara istilah *syirkah Mufawadhah* adalah akad yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam pekerjaan dengan syarat adanya kesamaan dalam harta, tindakan, wewenang, keuntungan, kerugian bahkan juga kesamaan dalam agama²⁷.

Dalam *syirkah Mufawadhah* ini disyaratkan kesamaan pada semua aspek yang disertakan dalam kerjasama yang akan dilakukan. Pada harta, masing-masing mitra hendaklah menyertakan modalnya sama dengan mitra yang lainnya, tidak dibolehkan apabila salah satu diantara keduanya memasukkan hartanya lebih besar dari mitra yang lainnya ataupun sebaliknya. Misalnya dua orang berkata, “kita bersekutu pada setiap apa

²⁵M. Solahuddin, *Loc. Cit*, h. 145.

²⁶Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), h.474.

²⁷Sayid sabiq, *Op. Cit*, h. 327.

yang dapat menguntungkan kita dan merugikan kita” sedangkan harta kedua orang itu berbeda, maka persekutuan itu menjadi batal (tidak sah)²⁸.

Setiap mitra memberi kuasa penuh terhadap anggota serikat lainnya untuk melaksanakan berbagai macam aktifitas serikat yang berkaitan dengan modal ataupun pekerjaan²⁹. Apabila salah satu mitra melakukan *tasharruf* baik itu penjualan ataupun pembelian, maka mitra serikat yang lain ikut menanggung terhadap tindakan mitranya tersebut, karena masing-masing mitra adalah penjamin pada tindakan yang dilakukannya, sebagaimana Ia menjadi penjamin bagi mitra lainnya. Begitu juga dalam hal wewenang salah seorang mitra tidak boleh lebih banyak daripada wewenang mitra yang lain. Kesamaan dalam agama juga menjadi syarat yang diperhatikan dalam bentuk *syirkah* ini, dimana persekutuan diantara orang muslim dengan orang kafir adalah tidak sah³⁰.

Bentuk *syirkah* ini hanya didukung oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, secara garis besar mereka sependapat atas kebolehan *syirkah* semacam ini, Meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syaratnya³¹. Adapun syarat yang diperselisihkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah ialah mengenai modal yang disertakan dalam serikat, dimana menurut Imam Malik dalam *syirkah* ini tidak dituntut adanya kesamaan

²⁸Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (semarang: CV. Asy Setia, 2003), Jilid III, h. 237-238.

²⁹Abu Bakar Jabir al-Jazai'ri, *Op. Cit*, h. 474.

³⁰Sayid sabiq, *Loc. Cit*.

³¹Ibnu Rusyd , *Op. Cit*, h. 269.

dalam modal (diantara kedua mitra serikat), karena ia disamakan dengan *syirkah Inan*. Sedangkan Imam Abu Hanifah mensyaratkan sahnya *syirkah Mufawadhah* ini adalah pada kesamaan modal diantara keduanya, Ia mengemukakan alasan bahwa sebutan *mufawadhah* itu menghendaki adanya kesamaan tersebut³².

Sementara Imam Syafi'i dan Hambali menilai bahwa *syirkah Mufawadhah* ini tidak dapat diterima, karena untuk terwujudnya kesamaan dalam perserikatan adalah sesuatu yang sulit bahkan didalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidaktahuan³³. Sedangkan muamalah yang mengandung ketidakjelasan merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, karena dikhawatirkan akan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil.

Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam al-Qur'an :



Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.* (Q.S al-Baqarah : 188)³⁴.

c. *Syirkah Wujud*

³²*Ibid.*

³³Sayid sabiq, *Op. Cit*, h. 328.

³⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 36.

Syirkah Wujuh adalah persekutuan yang dilakukan dua orang atau lebih tanpa modal sama sekali, mereka hanya bersandar pada kedudukan mereka dan kepercayaan para pedagang kepada mereka dengan catatan bahwa mereka bersekutu dalam keuntungan³⁵.

Persekutuan ini berbeda dengan bentuk *syirkah* sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam *syirkah* ini yang dihimpun bukanlah modal dalam bentuk uang atau suatu keahlian, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab³⁶. Dalam persekutuan ini yang dijadikan pijakan adalah jaminan-jaminan, kehormatan dan kepercayaan para penjual terhadap mereka³⁷.

Misalnya ketika A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang, lalu A dan B berserikat dengan cara membeli barang dari seorang pedagang misalnya C secara kredit. A dan B sepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut secara kontan dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C. Maka mereka membeli dan menjual dengan kepercayaan tersebut lalu laba dibagi bersama antara mereka berdasarkan kesepakatan³⁸. Dalam *syirkah Wujuh* masing-masing pihak dari dua orang yang berserikat adalah wakil bagi pihak yang lain dan

³⁵*Loc. Cit.*

³⁶ Saleh al-Fauzan, *Op. Cit*, h. 471.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ M. salahuddin. *Op. Cit*, h. 147-148.

sebagai penjamin di dalam pembayaran, karena jenis seperti ini termasuk ke dalam kongsi perwakilan dan *kafalah*³⁹.

Mengenai kebolehan *syirkah* ini Imam Malik berpendapat bahwa serikat itu berhubungan dengan urusan harta dan kerja, sementara kedua perkara ini tidak terdapat pada *syirkah Wujuh*, disamping itu didalamnya terdapat kesamaran, karena masing-masing pihak menggantikan kawannya dengan suatu pendapatan yang tidak ditentukan oleh pekerjaan dan tidak pula dengan usaha yang khusus. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpegangan bahwa *syirkah Wujuh* itu merupakan salah satu bentuk usaha, hingga karenanya dapat menjadi dasar serikat⁴⁰.

d. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan atau sering juga dinamai dengan *syirkah Amal*, *Shana'i*, *Taqabbul* merupakan kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan dimana keuntungan dari hasil pekerjaan tersebut atau upah yang diterimanya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama⁴¹. Misalnya tukang jahit, bengkel dan pelayanan barang lainnya.

³⁹, *Op. Cit* h. 472.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, h. 271

⁴¹ Sayid Sabiq, *Loc. Cit.*

Perserikatan ini merupakan bentuk kerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya kontribusi modal (harta). hal ini dikarenakan semua pihak yang berserikat mencurahkan tenaga mereka dalam bekerja untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka hasilkan. baik pekerjaan itu melalui kontribusi pikiran ataupun fisik (tenaga mereka sendiri)⁴². Persekutuan ini boleh diadakan, baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda, baik kedua-duanya bekerja maupun salah seorang dari keduanya saja yang bekerja tanpa yang lain, baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama⁴³.

Adapun yang menjadi dasar hukum kebolehan *syirkah* ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عبيدة الله : فيما نصيب يوم
: فجاء بأسيرين بشيئ

Artinya: *dari Abu Ubaidah, dari Abdullah Ia berkata Saad dan Amar berserikat mengenai harta rampasan perang badar, dimana saat itu Amar dan Abdullah datang tanpa membawa sesuatu apapun, sedang Saad datang sambil membawa dua tawanan, kemudian Rasullullah SAW memperserikatkan diantara keduanya, (HR. Abu Daud)*⁴⁴.

⁴²Saleh alfauzan, *Op. Cit*, h. 472.

⁴³*Loc. Cit.*

⁴⁴ Imam Abu Daud, *Op. Cit*, h. 228

Menurut Imam Abu Hanifah dan para *fuqoha'* Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah abdan* ini dibolehkan⁴⁵. hal ini didasari pada hadist diatas yang disamakan dengan orang-orang yang berperang dalam penerimaan *ghanimah* yang mereka memperolehnya karena bekerja. Namun keduanya berbeda pendapat akan syarat kesamaan pekerjaan dan tempat. Imam Malik mensyaratkan kedua syarat itu harus ada pada *syirkah* ini, Ia berpendapat bahwa perbedaan jenis pekerjaan atau tempatnya akan menambah kesamaran pada *syirkah* tersebut. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan sekalipun jenis pekerjaannya berbeda⁴⁶.

C. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*.

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks *skim* pembiayaan syariah dan merupakan akad yang berlaku diantara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya⁴⁷. Ia merupakan bentuk kedua dari penerapan bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diperaktekkan dalam sistem perbankan Islam⁴⁸.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/ PBI/2005 Pasal 1 Ayat 6 disebutkan

⁴⁵Ibnu Rusdy, *Op. Cit*, h. 270

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet.1. h.125.

⁴⁸Abdullah saed, *Bank Islam dan Bunga*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2003), cet.1 h.106.

bahwa *musyarakah* adalah : penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing⁴⁹.

Pada perbankan syariah Indonesia *musyarakah* ini diaplikasikan pada pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor⁵⁰. Namun dinegara-negara maju *skim* pembiayaan ini telah berkembang luas, di Sudan *musyarakah* telah digunakan secara luas dalam penyediaan dana pedesaan. Dan dinegara-negara barat *musyarakah* telah digunakan dalam pembiayaan pembangunan pemukiman⁵¹.

Adapun secara teknis pembiayaan melalui *musyarakah*, adalah sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal *Musyarakah*

Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Dalam penyertaan dana, masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁹Undang-Undang Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika), h. 18.

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Dan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Cet. Ke dua, h. 201.

⁵¹Latifa. M. Algaoud Dan Mervyn K. Lewis, *perbankan syariaah*.(Jakarta: Serambi, 2003), Cet. I, h. 70.

Dalam hal ini sifat modal sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang di investasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal *liquid* walaupun modal tersebut merupakan komoditas, namun dinilai dengan uang sesuai harga pasar pada saat perjanjian⁵². Dalam kasus pemberian modal dalam komoditas, nilai pasar dari komoditas terkait akan menentukan bagian seorang rekanan dalam permodalannya⁵³.

2. Pengelolaan Manajemen *Musyarakah*

Pada prinsipnya setiap mitra mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan manajemen kerja⁵⁴. Berdasarkan kesepakatan, bank dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha⁵⁵. Dan selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank sebagai pemilik dana. Namun sebagai mitra usaha bank juga dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati dan melakukan intervensi kebijakan usaha⁵⁶.

⁵²Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 52.

⁵³Muhammad Ayub, *Op. Cit*, h.480

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Husni Thamrin, *Ekonomi dan manajemen suatu perspektif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2009), Edisi I, h. 91.

⁵⁶Veithzal Riva'I, *Op. Cit*, h. 122.

Jika semua mitra sepakat untuk bekerja dan mengelola usaha tersebut secara bersama, maka masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh semua mitra, dalam keadaan usaha yang normal harus disetujui oleh semua mitra⁵⁷.

3. Proporsi Keuntungan dan Kerugian

Pembagian keuntungan dan kerugian merupakan aspek yang sangat krusial dalam kemitraan, hal ini dikarenakan porsi modal yang diserahkan oleh masing-masing mitra tidak sama⁵⁸. Karenanya bank sebagai mitra harus menyepakati proporsi keuntungan diawal akad berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang telah disepakati⁵⁹. Adapun rasio keuntungan tersebut harus dihubungkan dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan bukan dari modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra⁶⁰.

Sedangkan mengenai kerugian, bank dan nasabah akan menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati

⁵⁷*Loc. Cit.*

⁵⁸Veithzal Riva'i, *IOp. Cit*, h. 483.

⁵⁹Husni Thamrin, *Loc. Cit.*

⁶⁰Muhammad Ayub, *Op. Cit*, h 485.

tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan antara keduanya. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi hasil untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode pendapaatan (*revenue sharing*)⁶¹.

4. Masa berlakunya kontrak (akad) pembiayaan *musyarakah*

Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash flow*) usaha yang dijalankan oleh nasabah⁶². Setelah usaha atau proyek yang dijalankan selesai nasabah dapat mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank⁶³.

5. Jaminan dalam kontrak (akad) pembiayaan *musyarakah*

Semua mitra yang ada dalam kontrak (akad) *musyarakah* harus memelihara asset dari kemitraan. untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka bank dapat meminta jaminan atau anggunan yang memadai dari pihak mitra untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam akad karena lalai atau kecurangan dan perbuatan jahat yang terbukti disengaja. Hal ini

⁶¹*Loc. Cit.*

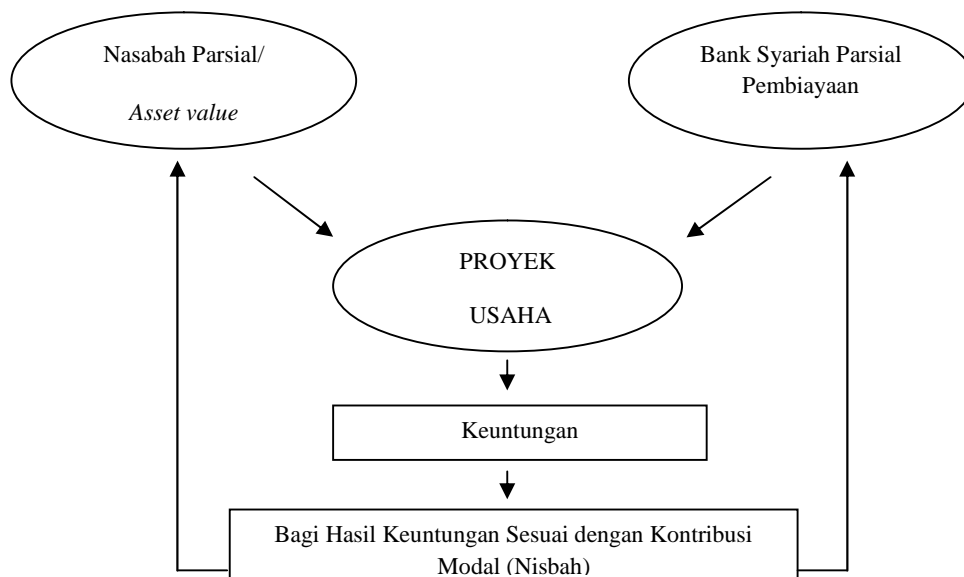
⁶²*Ibid.*

⁶³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi III, Cet. III, h. 103.

dikarenakan bank mengelola dana deposan dan menghindari resiko kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal yang telah disebutkan diatas⁶⁴.

Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. *Musyarakah* dapat bersifat Permanen, maupun menurun. Dalam *musyarakah* Permanen bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam *musyarakah* Menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra menjadi pemilik usaha tersebut⁶⁵.

Penerapan prinsip *musyarakah* dapat dilihat pada sistem perbankan, Syafi'i Antonio membuat sebuah skema pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah sbagaimana yang digambarkan pada halaman berikut :



⁶⁴ Muhammad Ayub, *Loc. Cit.*

⁶⁵ Ascarya, *Op. Cit*, h. 53.

Sesuai dengan sifat bisnis transaksi, pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa manfaat baik bagi bank maupun nasabah, adapun manfaat pembiayaan *musyarakah* diantaranya :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan alur kas (*cash flow*) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang *riil* dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
5. Perinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi⁶⁶.

⁶⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit*, h.93-94

BAB IV

PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* iB MIKRO KECIL PT. BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU TERHADAP KONSEP SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Konsep *Musyarakah* Pada Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

Syirkah merupakan salah satu akad yang dibenarkan dalam Islam. Pola-pola akad *syirkah* ini terus diimplikasikan seiring dengan perkembangan zaman. Bank syariah yang lahir pada dekade belakangan ini mencoba untuk menerapkannya pada sektor-sektor pembiayaan sebagai gebrakan baru untuk menjawab kebutuhan umat muslim yang semakin hari semakin berkembang dalam melakukan aktifitas perekonomian mereka. Hal inilah yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjalankan aktifitas operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan pelayanan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana/ modal dengan *flafon* kecil sama dengan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) melalui pembiayaan iB Mikro Kecil dengan akad *musyarakah*. Pembiayaan ini merupakan salah satu cara PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam menarik minat nasabah untuk bekerjasama dalam hal dana/modal dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*)¹.

¹ Helwin Yunus, Pinsi Pemasaran PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, Wawancara, Tanggal 20 Maret 2011.

Secara administrasi, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru menetapkan beberapa ketentuan bagi nasabah yang akan diberikan pembiayaan iB Mikro Kecil. Adapun syarat tersebut meliputi diantaranya² :

a. Peminjaman

1. Nasabah mengajukan surat permohonan pengajuan pembiayaan secara tertulis³.
2. Pihak bank akan mengevaluasi dan menilai semua aspek yang berkaitan dengan kelayakan nasabah guna memberikan keputusan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.
3. Setelah pembiayaan disetujui, bank berhak meminta anggunan/jaminan kepada nasabah sebagai antisipasi terhadap resiko kelalaian dan tindakan wanpreatasi yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh nasabah. Adapun nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah adalah 50% dari nominal pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.

² Dokument Bank Riau Kepri Cabang Syariaih Pekanbaru

³Namun kebanyakan dari nasabah mengkonsultasikan kepada pihak bank secara lisan terlebih dahulu tanpa mengajukan surat permohonan secara resmi, hal tersebut dilakukan agar nasabah bisa mendapat suatu gambaran terhadap kemungkinan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan tersebut. Helwin Yunus, Pinsi Pemasaran, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 20 Maret 2011.

b. Pencairan

Nasabah dapat melaksanakan penarikan pembiayaan *musyarakah* setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Menandatangani perjanjian (akad).
2. Memenuhi persyaratan penarikan pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam surat SP3 (Surat Permohonan Penarikan Pembiayaan).
3. Menyerahkan bukti-bukti kepemilikan beserta dokumen yang berkaitan dengan jaminan atau anggunan dan telah dilakukan pengikatan jaminan atau anggunan.
4. Menyerahkan Surat Permohonan Penarikan Pembiayaan kepada bank.
5. Menyerahkan asli kontrak pekerjaan dan *standing instruction* proyek yang menyatakan bahwa pencairan dan pembayaran proyek akan disalurkan melalui rekening nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

c. Pengembalian

1. Pada saat jatuh tempo nasabah wajib mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembayaran *musyarakah* dalam perjanjian ini dan membayar bagi hasil yang menjadi hak bank, kecuali terdapat kerugian yang telah diverifikasi oleh bank.
2. Nasabah dapat melakukan pembayaran kembali pembiayaan secara proposional sesuai *termyn* yang diterima.

3. Setiap pembayaran kembali fasilitas pembiayaan oleh nasabah kepada bank dilakukan di kantor bank atau tempat lain yang ditunjuk bank atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di bank.
4. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 18 dan 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening nasabah guna membayar/melunasi kewajiban nasabah kepada bank.
5. Apabila nasabah membayar kembali atau melunasi pembiayaan *musyarakah* lebih awal dari waktu yang disepakati, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian bagi hasil yang menjadi hak bank.

Semua aspek persyaratan yang dimuat pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank di atas tidak terlepas dari penilaian yang dikenal dengan 5C yaitu ⁴ :

1. *Character* (karakter)

Sifat atau karakter nasabah dalam pengambilan pinjaman.

2. *Capacity* (kapasitas atau kemampuan)

⁴ Muhammad, *Manajemen Dan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Cet. Ke dua, h. 222.

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan pengambilan pinjaman yang diambil.

3. *Capital* (modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

4. *Condition* (kondisi)

Analisa ini diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usahanya sendiri

5. *Colletral* (jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap yang diberikan oleh nasabah.

Hal diatas menjadi acuan dalam membuat kebijakan oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru untuk meminimalisir resiko yang akan atau dapat ditimbulkan oleh pemberian pembiayaan kepada nasabah dimana kebijakan tersebut direalisasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bank tidak menanggung resiko usaha dan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan nasabah sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, pasal 11, dan atau pasal 13 dalam akad perjanjian kontrak *musyarakah*.
2. Resiko usaha dan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan nasabah ditanggung oleh nasabah.
3. Resiko usaha dan kerugian yang diakibatkan karena penghentian usaha yang dibiayai dari fasilitas pembiayaan *musyarakah* sebelum jangka

waktu perjanjian berakhir diakui sebagai pengurangan pembiayaan *musyarakah*.

4. Bank akan menerima dan menyetujui terjadinya resiko usaha dan kerugian, apabila bank telah menerima dan menilai kembali semua perhitungan yang dibuat dan diserahkan nasabah kepada bank, dan bank telah menyerahkan hasil penilaian perhitungan usaha secara tertulis kepada nasabah⁵.

Musyarakah pada iB Mikro Kecil merupakan bentuk pembiayaan modal kerja yang lebih mengutamakan kepada usaha-usaha yang bergerak dibidang proyek. Baik itu proyek pemerintahan maupun proyek swasta, namun tidak menutup kemungkinan pada jenis usaha-usaha lainnya⁶. Oleh karenanya penulis akan lebih mengarahkan ini pada jenis pekerjaan proyek. Dalam aplikasinya, jumlah penyertaan modal yang diberikan oleh bank diberikan secara bertahap melihat kepada perkembangan kinerja yang dilakukan oleh nasabah dalam proyek tersebut. Sedangkan penyertaan modal dari nasabah ialah *termyn* pembayaran awal dari kontrak proyek yang mereka kerjakan⁷.

⁵Dokumen Bank Riau Cabang Syariaiah. *Log.cit*

⁶Pihak bank melihat bahwa resiko pada pembiayaan proyek lebih kecil, dan bisa diawasi oleh pihak bank, ini dikarenakan nilai kontrak yang terdapat didalamnya dituangkan secara jelas, dan bank juga dapat mengawasi ketika *termyn* pembayaran dilakukan kepada nasabah pembiayaan tersebut. Dengan jumlah rekening nasabah 82 per Desember 2010. Abdul Mubarak, Account Officer pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariaiah Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 20 Maret 2011.

⁷Hal inilah yang membedakan antara *musyarakah* dengan *mudharabah*, dimana kedua belah pihak sama-sama menyediakan dana dalam mengerjakan suatu usaha tertentu.

Adapun mengenai kadar pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah, maka pihak bank selaku penyerta dana memberikan kuasa untuk mewakilkan atas semua pekerjaan tanpa adanya partisipasi secara langsung terhadap pekerjaan tersebut⁸. Namun bank atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha *musyarakah* berdasarkan pasal 15 dalam akad kontrak⁹.

Adapun mengenai *nisbah* bagi hasil yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah dalam pembiayaan tersebut dihitung melalaui rasio atau perbandingan pembagian keuntungan antara bank dan nasabah.

Perhitungan bagi hasil dilaksanakan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nominal Bagi Hasil} = \text{Nisbah} \times \text{Dasar Bagi Hasil}$$

Keterangan :

Nominal bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian *nisbah* dengan dasar bagi hasil sebagaimana yang diatur pada pasal 2¹⁰.

berikut ini penulis memberikan contoh perhitungan *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan iB Mikro Kecil pada satu kasus pembiayaan proyek :

⁸Helwin Yunus, Pinsi pemasaran, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 20 Maret 2011.

⁹ Dokumen Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

¹⁰ *Ibid.*

PT. XYZ mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal kerja pada pekerjaan pengadaan pakan ikan pada kegiatan pembangunan keramba (lanjutan) tahun anggaran 200X dengan fasilitas pembiayaan iB Mikro Kecil dan dapat dipertimbangkan diberikan atas dasar kontrak dengan pola *Musyarakah* sebesar Rp 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak	:	Rp	1,897,500,000.00	
Pembiayaan Bank	:	Rp	420,000,000.00	
Proyeksi Pendapatan	:	Rp	379,500,000.00	
<i>Nisbah</i> Bank	:		2.02%	Rp 7,665,000
<i>Nisbah</i> Nasabah	:		97.98%	Rp 371,835,000

Expectasi rate adalah 7.3 % atau *nisbah* bank sebesar Rp. 7.665.000,-

Jangka waktu pembiayaan adalah tiga bulan.

Demikianlah ulasan beberapa hal yang berkenaan dengan konsep *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil . PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

B. Konsep *Syirkah* Menurut Imam Syafi'i

Pada permasalahan yang pertama penulis telah memaparkan bagaimana konsep *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru, dimana pembiayaan *musyarakah* tersebut didasari pada pola-pola *syirkah* dalam pandangan para fuqaha klasik. Disini penulis tertarik untuk membahas permasalahan *syirkah* ini yang dipelopori oleh satu dari *fuqaha* ternama yaitu Imam Syafi'i.

Konsep *syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i akan dibahas pada bab ini. Imam Syafi'i di dalam pembahasan tentang *syirkah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga *syirkah* itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Syafi'i di dalam melakukan serikat (*syirkah*) adalah menyangkut masalah akad, harta dan bentuk usaha (*syirkah*). *Syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah persekutuan yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

1. Adanya percampuran harta
2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha)
3. Pembagian keuntungan¹¹.

Imam Syafi'i mengatakan dalam bukunya "*al-Umm*" bahwa : *syirkah Mufawadhah* itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa *syirkah* ini adalah *syirkah Inan*. Imam Syafi'i tidak membenarkan semua *syirkah* tersebut, kecuali *syirkah Inan*¹².

¹¹Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakup, (Malasyia: Victory Agencie, 1989), Jilid 5, Cet. Ke-2, h. 130.

¹²Abu Ishaq Ibrahim, *at-Tanbih Fi Fiqh as-Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah, (Semarang: Asy-syifa', 1992), Cet. Pertama, h. 154.

Dalam melakukan *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, misalnya salah satu pihak memiliki dirham sedangkan yang lain dinar, atau salah satu pihak milik sendiri sedangkan yang lain adalah utang maka *syirkah* itu tidak sah.
2. Harta setiap pihak itu harus sama dalam jumlah. Misalnya kalau harta itu berupa barang ia hendaklah dinilai berdasarkan harga barang dan bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerjasama diantara keduanya¹³.

Imam Syafi'i hanya membenarkan *syirkah Inan*, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan *syirkah Inan* ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama, macam harta modal. Kedua, kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. ketiga, kadar pekerjaan dari kedua peserikat berdasarkan besarnya harta.

a. Harta Modal

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati para *fuqoha* dan ada pula yang diperselisihkan. Kaum muslimin telah sepakat bahwa serikat dagang itu dibolehkan pada satu macam barang, yakni dinar dan dirham, meskipun pada dasarnya serikat "*Inan*" itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai. Disepakatinya

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang; Asy-Syifa', 1990), Juz 3, h. 265.

oleh para *fuqoha* yang mensyaratkan tunai pada jual beli dengan emas dan dirham, tetapi *ijma'* telah mengecualikan hal ini dalam serikat dagang.

Mereka (*fuqoha*) berbeda pendapat dengan serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda dengan mata uang yang berbeda pula. Jika kedua belah pihak berserikat dengan bermodalkan dengan dua macam barang, atau dengan barang dan uang. Maka cara seperti ini diperbolehkan oleh Ibnu al-Qasim, Imam Malik.

Namun Imam Syafi'i tidak membenarkan hal yang demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta permodalan yang berlainan menurut pandangan Imam Syafi'i harus sama¹⁴. Begitu juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Imam Syafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain.

Imam Syafi'i lebih menekankan pada pencampuran harta di dalam *syirkah*, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya¹⁵.

¹⁴*Ibid.* h. 264.

¹⁵*Ibid.*

Adapun pencampuran harta *syirkah* itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal yang lebih dari pihak lain¹⁶.

b. Pembagian Keuntungan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa di dalam *syirkah* pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati¹⁷, demikian juga halnya bila terjadi kerugian. Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya tidak sama pembagiannya dan boleh juga sama¹⁸.

Namun apabila modal yang mereka berikan masing-masing jumlahnya sama, lalu mereka mensyaratkan meminta lebih dalam keuntungan, atau tidak sama dalam modal, lalu mereka mensyaratkan meminta pembagian keuntungan yang sama, maka akad tersebut menjadi batal. Kemudian keuntungan tersebut dibagi menjadi modal

¹⁶ Imam Syafi'i mensyaratkan adanya pencampuran harta secara logika dengan adanya pencampuran harta tersebut, maka pekerjaan antara kedua belah pihak berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Karena masing-masing pihak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak lainnya, seperti halnya kepada dirinya sendiri. Lihat, Ibnu Rusyd, *Ibid*, h. 267. Kemudian menerangkan bahwa Imam Syafi'i mencampurkan harta masing-masing pihak hendaknya harta itu sama dalam jumlahnya. Kalau harta keduanya itu berupa barang (*'ardh*) dan ia hendaknya bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebagian barang dengan harga barang sekutunya, sehingga menjadi kerjasama diantara keduanya, kemudian masing-masing mengizinkan sekutu mengendalikannya. Dapat dilihat Abu Ishaq Ibrahim, *Op.Cit*, h.154.

¹⁷*Ibid*, h. 155.

¹⁸Kedua belah pihak yang melakukan perserikatan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan boleh membagi laba secara merata, dan boleh tidak sama. Ali ra, berkata : "laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama"

yang diberikan mereka masing-masing dan masing-masing boleh menuntut upah pekerjaannya¹⁹.

Imam Syafi'i berpegangan bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya.

Menurut penulis pandangan Imam Syafi'i mengenai keuntungan secara jelas ia menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, bukan kepada besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.

c. Usaha (kadar pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikut kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan disyaratkannya ksesamaan harta oleh Imam Syafi'i dengan memandang kepada usaha, karena ia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Jika harta keduanya tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah satunya. Itu sebabnya Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan serikat dagang, di mana masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainnya²⁰.

¹⁹*Ibid*, h. 155.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 268

Adapun *syirkah* (kerja sama) badan itu ialah suatu kerjasama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri²¹.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa usaha yang dilakukan dalam pandangan Imam Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian dengan melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan keahliannya masing-masing.

Menurut penulis pada dasarnya yang diinginkan dalam pandangan Imam Syafi'i melalui konsep *syirkah*nya tersebut adalah kejelasan dalam segala aspek untuk menghindari kesamaran dan memakan harta orang lain dengan jalan bathil dalam melakukan peserikatan. Karena hal tersebut merupakan larangan yang harus dihindari bagi setiap muslim dalam menjalankan kegiatan perekonomian mereka untuk mendapatkan keredahaan Allah dalam usaha yang mereka jalani. Dan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan oleh Islam.

Demikianlah beberapa hal yang berkenana dengan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i yang hanya membolehkan *syirkah Inan* yang merupakan salah satu sistem dari ekonomi Islam yang menjadi nuansa patokan penulis dalam sistem ekonomi masa kini.

²¹ Abu Ishaq Ibrahim, *Op.Cit.* h. 155

C. Analisis Relevansi Pembiayaan *Musyarakah* iB Mikro Kecil Terhadap Konsep *Syirkah* Menurut Imam Syafi'i

Dalam sistem perekonomian masa kini, kita banyak melihat bentuk-bentuk *syirkah* (perserikatan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah, dan bank syariah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan tersebut. Sebagai suatu institusi keuangan yang beroperasi dengan berlandaskan syariah Islam, maka bank syariah perlu melihat semua aspek produk-produk yang dikeluarkan olehnya melalui legalitas dalam aspek ketentuan yang dibenarkan Islam. Islam dengan kesempurnaannya telah memberi aturan-aturan model perniagaan dan usaha yang dibenarkan dengan konsepnya tersendiri. Diantara bentuk perniagaan yang dibenarkan dalam Islam adalah *syirkah*.

PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan produk pembiayaan iB Mikro Kecilnya sebagaimana yang penulis uraikan pada poin A telah menggambarkan bagaimana konsep *musyarakah* yang mengadopsi pada pola-pola *syirkah* klasik yang diperkenalkan dalam Islam. Selanjutnya apabila pola-pola *musyarakah* yang ada pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru tersebut kita bandingkan dengan konsep *syirkah* klasik, maka kita akan menemukan titik persamaan antara pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru terhadap konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i tersebut. Bahwa bentuk *musyarakah* secara umum mempunyai nilai persamaan dengan *syirkah* dalam Islam terutama *syirkah Inan*.

Namun tidak pula menutup kemungkinan adanya perbedaan diantara keduanya, walaupun perbedaan tersebut tidak begitu banyak dalam hal operasionalnya.

Berikut penulis paparkan beberapa aspek yang relevan antara konsep *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil terhadap konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i :

1. *Musyarakah* yang ada pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru diartikan sebagai kerjasama dalam hal modal/dana pada urusan usaha tertentu. Hal ini juga yang diartikan dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa *syirkah* itu dimaknai dengan berserikat dalam suatu urusan tertentu.
2. Akad *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru ditujukan pada satu aspek kerjasama yaitu modal (uang), hal ini sanga relevan dengan *syirkah* yang dibenarkan oleh Imam Syafi'i yaitu *syirkah Inan*, persekutuan dengan harta.
3. Adapun unsur-unsur yang harus ada pada *syirkah* menurut Imam Syafi'i diantaranya adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu dan membagi keuntungan dari hasil perkerjaan pada harta tersebut. Hal tersebut juga terdapat pada pembiayaan *musyarakah* iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, baik pihak bank ataupun nasabah sama-sama menyediakan modal/dana untuk menjalankan usaha tertentu yang telah diajukan oleh nasabah kepada pihak bank. Dan ketetapan mengenai keuntungan dan kerugian yang

diperoleh nasabah dalam pembiayaan iB Mikro Kecil, keuntungan dinyatakan dalam rasio *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati diawal kontrak akad *musyarakah* dimana antara nasabah dan pihak bank telah sama-sama sepakat dan rela atas penetapan *nisbah* bagi hasil tersebut, begitu juga sebaliknya. Ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam akad *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

4. Berawal dari titik persamaan antara konsep *musyarakah* yang identik dengan penyertaan modal (uang) pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan konsep *syirkah* Imam Syafi'i, di mana dapat penulis katakan bahwa pada penyertaan modal yang dilakukan oleh nasabah serta penyertaan modal yang dilakukan oleh pihak bank serta adanya pekerjaan yang akan dilakukan oleh nasabah, hal ini menggambarkan kesamaan pada konsep *syirkah Inan* yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahwa serikat itu hanya berhubungan dengan harta dan adanya pekerjaan²². Hal ini memberikan suatu pandangan bahwa *syirkah* pada konsep *syirkah Inan* yang dikatakan oleh Imam Syafi'i nyatanya masih sangat relevan dan dapat diimplikasikan pada pembiayaan *musyarakah* iB Mikro Kecil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru

²² Ibnu Rusyd, *log.Cit*, h. 271

5. Pada pembiayaan *musyarakah* iB Mikro Kecil, bank memberikan kuasa *wakalah* kepada nasabah untuk menjalankan usahanya dan begitu pula *wakalah* dalam pandangan Imam Syafi'i dibenarkan. Ia mengatakan bahwa “*boleh bagi wakil untuk mewakilkan kepada orang yang dipandangnya untuk menjadi wakil*”²³. Namun tentunya hak mewakilkan yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan disertai dengan hak yang membolehkannya pengawasan dari pihak bank dalam jalannya usaha yang dilakukan nasabah tersebut.

Dari uraian penulis diatas dapat diketahui bahwa konsep *syirkah* klasik Imam Syafi'i nyatanya masih sangat relevan dengan konsep *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil yang ada pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru saat ini, dimana kemitraan yang ada pada pembiayaan iB Mikro Kecil adalah kemitraan yang didasarkan pada penyertaan modal sebagaimana *syirkah Inan* yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i.

²³ Asy-Syafi'i *Op.Cit.* h.131

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang konsep *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dan konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i serta relevansi diantara keduanya. Maka pada bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun pembiayaan *musyarakah* pada iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru adalah kerjasama modal/dana kepada nasabah. Dimana pada kontrak akad dengan nasabah didalamnya telah mencakup *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak nasabah, maka bank selaku penyerta dana memberikan kuasa untuk mewakilkan kepada nasabah dalam pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah atas dana pembiayaan yang telah dipercayakan kepada nasabah tersebut, akan tetapi bank juga menyertainya dengan pengawasan. Selanjutnya *nisbah* bagi hasil yang ditetapkan oleh bank dihitung melalui rasio atau perbandingan pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Mengenai kerugian yang dilakukan nasabah secara sengaja, atau kelalaian nasabah dalam menjalankan usahanya maka itu menjadi tanggungan dari nasabah. Dan untuk meminimalisir resiko

kerugian, bank meminta jaminan kepada nasabah sebagai rasa tanggung jawab atas dana *musyarakah* yang dikelola oleh pihak nasabah.

2. *Syirkah* menurut pandangan Imam Syafi'i yang dibenarkannya adalah *syirkah Inan*. Yaitu *syirkah* yang berdasarkan pada harta modal. Sementara itu konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan diantara keduanya.
3. Adapun relevansi antara konsep *musyarakah* pada pembiayaan iB Mikro Kecil dan *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah persekutuan dalam modal yang relevan dengan konsep *syirkah Inan* yang telah penulis paparkan pada konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i yang juga didasarkan pada harta modal.

B. Saran

Dari hasil analisis dan penarikan kesimpulan sebelumnya, penulis akan mengemukakan beberapa saran kepada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai berikut:

1. Bentuk *musyarakah* pada iB Mikro Kecil lebih cenderung kepada usaha proyek, maka penulis menyarankan agar pihak bank juga memberikan kesempatan pada jenis usaha-usaha lain yang juga bisa dibentuk dengan akad *musyarakah*. Karena hal ini bisa menjadikan inovasi pada penempatan dana pihak deposan pembiayaan yang mungkin masih belum terjangkau oleh pihak bank melalui satu jenis usaha yang monoton sahaja.

2. Nilai jaminan yang diberikan oleh bank terlalu tinggi dalam pembiayaan yaitu 50% dari nominal pembiayaan, oleh karenanya penulis menyarankan agar pihak bank bisa memberikan kemudahan dalam masalah jaminan tersebut kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. 2005. Cet Ke-2. *Imam Syafi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah aqidah, Politki dan Fiqih*. Jakarta: Lentera
- Al Arif, M.Nuryanto. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta
- al-Fayyuni, Muhammad Ibrahim. 2008. *Imam Syafi'i Pelopor Fiqih dan Sastra*. Cet Ke-1. Jakarta: Erlangga
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2006. *Minhajul Muslim*. Jakarta : Darul Haq
- an-Nabahi, Taqiyuddin. 1996. Cet Ke-2. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya : Risalah Gusti
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asy-Syafi'I. *Al-Umm*. 1989. Terjemahan H. Ismail Yakub. Juz V. Malaysia : Victory Agencie
- Asy-Syaukani. *Nailul Authar*. Juz v. Beirut : Dar al-Fikr
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta : Gramedia Pustaka 2009
- az-Zuhaii, Wahbah. *Fiqhul Islam*. Juz III. Beirut : Dar al-Fikr
- Brosur PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah
- Departemen Agama RI. 2006. *al-Qur'qn Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan
- Dokumen PT. Bank Riau Kepri
- _____ PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah

- Ibrahim, Abu Ishaq. 1992. *at-Tanbih Fi Fiqh as-Syafi'i*, terj. Hafid Abdullah, Cet. Pertama. Semarang: Asy-syifa'
- Imam Abu Daud. 1994. *Sunan Abi Daud* . Juz III. Beirut : Dar al-Fikr
- Imam al-Ghazal. 2003. *Ihya Ulumuddin*. Jilid III. semarang: CV. Asy Setia
- Imam Syafi'i. [http, wikipedia. com](http://wikipedia.com) . 27 April 2011
- Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi III. Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammmad. 2005. *Konstruksi Mudhorobah dalam Bisnis Syaria'h*. Cet Pertama. Yogyakarta : BPFE
- _____. 2005. *Manajemen Dan Bank Syariah*. Cet. Ke dua. Yogyakarta: Ekonisia
- M. Algaoud, Latifa. Dan K. Lewis, Mervyn. *perbankan syaraiah*. Cet. I. Jakarta: Serambi
- M. Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Edisi I. Jakarta : Rajawali Pers
- Mubarak, Jaih. 2002. *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet Ke-3. Jakarta : Sinar Grafika
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Edisi I. Jakarta : Rajawali Press
- Rusdy, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M. A. Abdurahman, Cet. Kedua. Semarang: Asyifa
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. 2009. Terj. Mujahidin Muhayan. Cet Pertama. Jakarta : PT. Pena Pundi Akasara.
- Saed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. cet.1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. cet.1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Thamrin, Husni. 2009. *Ekonomi dan manajemen suatu perspektif*, Edisi I. Pekanbaru: Suska Press

Undang-Undang Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*, Cet. Kedelapan. Jakarta : Hidakarya Agung

Yunus, Helwin. Pinsi pemasaran, *PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru*, Wawancara, Tanggal 20 Maret 2011

PANDUAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana prosedur Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
3. Apa saja syarat-syarat nasabah yang bisa menerima Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
4. Apa saja jenis usaha nasabah yang biasanya diberikan Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
5. Bagaimana bentuk penyertaan dana dan partisipasi pihak bank dalam mengawasi pekerjaan nasabah yang diberikan Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
6. Bagaimana ketentuan dan cara pembagian *nisbah* bagi hasil dari pembiayaan Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
7. Bagaimana bank mengatasi resiko kerugian yang dapat ditimbulkan dari Pembiayaan iB Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?

BIOGRAFI PENULIS



M. NASRUL AMIN, lahir di Bokor, 24 Maret 1989 Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Anak dari Bapak Abdul Malik HI dan Ibu Nurhayati binti Katan. Pendidikan SDN 024 desa Bokor pada tahun 1995-2001, kemudian melanjutkan pendidikan MTS di Pondok Pesantren Islamic Centre al-Hidayah Kampar pada tahun 2001-2004, dan MAN 2 Model Pekanbaru pada tahun 2004-2007. dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi Program SI di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2007-2011.

Berkat rahmat Allah SWT, tahun 2011 penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembiayaan *islamic Banking* (iB) Mikro Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dan Relevansinya Dengan *Syirkah* Menurut Imam Syafi’i” di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, MA dan dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian sarjana pada tanggal 27 Juni 2011 dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI).